

KOP SURAT
KEMENTERIAN/LEMBAGA (SATKER)

Nomor :(2) (3)
Lampiran : (4)
Hal : Usulan Nama Calon Peserta Sertifikasi Bendahara

Yth. Pimpinan Tempat Uji Kompetensi Sertifikasi Bendahara
d.a. KPPN Kotabumi
Jalan Alamsyah RPN KM. 3, Kotabumi - Lampung

Sehubungan dengan Surat Kepala KPPN Kotabumi Nomor : S-100/WPB.08/KP.03/2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Informasi E-Learning dan Microlearning pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan BPPK Kemenkeu, dengan ini kami mengusulkan nama calon peserta Sertifikasi Bendahara dengan kode satker(8) sebagai berikut :

No	Nama	NIP/NRP	Pangkat/Gol	Status (Bendahara/Calon Bendahara)
1.	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	(9)	(10)	(11)	(12)
dst	(9)	(10)	(11)	(12)

Sebagai dasar usulan tersebut, bersama ini kami lampirkan berkas-berkas pendukung yang dipersyaratkan, antara lain :

- 1. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir;
- 2. Fotokopi SK Kepangkatan/Golongan terakhir yang dilegalisir;
- 3. Fotokopi Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK/Lembaga Diklat lainnya/ Lembaga Sertifikasi Profesi (**coret yang tidak perlu**) yang dilegalisir;
- 4. Fotokopi SK Penunjukan sebagai Bendahara yang dilegalisir;
- 5. Fotokopi Sertifikat Diklat Persiapan Sertifikasi yang dilegalisir;
- 6. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian surat usulan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala (13),

.....(14)
NIP/NRP.(15)

PETUNJUK PENGISIAN

1. Diisi dengan kop surat dinas Satker.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan tanggal surat.
4. Diisi dengan jumlah lampiran surat.
5. Diisi dengan nomor surat pengumuman tentang rencana pelaksanaan/jadwal Ujian Sertifikasi Bendahara yang disampaikan oleh Unit Penyelenggara.
6. Diisi dengan tanggal surat pengumuman tentang rencana pelaksanaan/jadwal Ujian Sertifikasi Bendahara yang disampaikan oleh Unit Penyelenggara.
7. Diisi dengan perihal surat pengumuman tentang rencana pelaksanaan/jadwal Ujian Sertifikasi yang disampaikan oleh Unit Penyelenggara.
8. Diisi dengan nomor kode Satker.
9. Diisi dengan nama calon peserta Sertifikasi.
10. Diisi dengan NIP/NRP calon peserta Sertifikasi.
11. Diisi dengan pangkat/golongan calon peserta Sertifikasi.
12. Diisi dengan status calon peserta Sertifikasi (Bendahara atau calon Bendahara).
13. Diisi dengan jabatan kepala Satker yang bersangkutan.
14. Diisi dengan nama kepala Satker yang bersangkutan.
15. Diisi dengan NIP/NRP kepala Satker yang bersangkutan.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Nama Calon Peserta :

No	Persyaratan	Kelengkapan Dokumen		Ket.
		Hardcopy	Softcopy (max 100 Kb)	
DOKUMEN PERSYARATAN UMUM				
1	Formulir Pendaftaran Sertifikasi (Lamp II PER-37/PB/2016)	[] Ada [] Tidak Ada	[] Ada [] Tidak Ada	
2	Copy Ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian	[] Ada [] Tidak Ada	[] Ada [] Tidak Ada	Min. SLTA
3	Copy SK Kepangkatan/Golongan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian	[] Ada [] Tidak Ada	[] Ada [] Tidak Ada	Min. II/b / Briptu/Sertu
4	Copy Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian	[] Ada [] Tidak Ada	[] Ada [] Tidak Ada	Terbit sblm 20 Jan 2016
5	Surat Usulan nama calon peserta Sertifikasi Bendahara dari Kepala Satker (Lamp III PER-37/PB/2016)	[] Ada [] Tidak Ada	[] Ada [] Tidak Ada	
6	Pas Foto berwarna terbaru (paling lama 6 bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6, sebanyak 2 (dua) lembar dan di bagian belakang setiap pas foto ditulis Nama & NIP peserta	[] Ada [] Tidak Ada	[] Ada [] Tidak Ada	
DOKUMEN PERSYARATAN TAMBAHAN				
1	Copy SK penunjukan sebagai Bendahara yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian	[] Ada [] Tidak Ada	[] Ada [] Tidak Ada	
2	Copy Sertifikat Diklat Persiapan Sertifikasi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Persiapan Sertifikasi	[] Ada [] Tidak Ada	[] Ada [] Tidak Ada	Terbit sblm 20 Jan 2016
3	Copy Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Diklat Lainnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon yang memiliki sertifikat diklat Bendahara selain dari BPPK	[] Ada [] Tidak Ada	[] Ada [] Tidak Ada	Terbit sblm 20 Jan 2016
4	Copy Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon yang memiliki sertifikat profesi dimaksud	[] Ada [] Tidak Ada	[] Ada [] Tidak Ada	Terbit sblm 20 Jan 2016

Catatan :

1. Untuk softcopy (hasil scan) berupa file JPG atau PDF dengan ukuran masing-masing max 100 Kb
2. **KPPN berhak menolak** usulan yang tidak ditandatangani oleh Kepala Satker ybs
3. Peserta diberikan waktu sampai dengan 31 Oktober 2016 untuk melengkapi persyaratan.
4. Tanda Bukti Registrasi dapat dicetak jika semua persyaratan sudah dilengkapi

Kolom di bawah diisi oleh Petugas TUK

PROSES	TANGGAL	STATUS *)	PARAF PETUGAS
Verifikasi Kelengkapan Dokumen		LOLOS / TIDAK	
Input dan Upload ke SIMSERBA		diisi Nomor Pendaftaran	